

## KBM di Sukoharjo Tetap Online

**SUKOHARJO (KR)** - Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka sekolah di Sukoharjo Januari 2021 ini resmi ditunda. Hari pertama sekolah dimulai Senin (4/1) tetap memakai sistem online edaran jenjang dari PAUD/TK hingga SMA/SMK. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan surat edaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Sukoharjo karena masih pandemi virus Korona.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo Darno, Minggu (3/1) mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo pada akhir Desember tahun 2020 lalu sudah mengeluarkan surat edaran (SE) kepada pihak sekolah yang selanjutnya diteruskan kepada orangtua murid sebagai pemberitahuan. Isi SE tersebut secara garis besar menerangkan kebijakan KBM tatap muka di sekolah ditunda.

Penundaan berlaku disemua jenjang sekolah mulai PAUD/TK hingga SMA/SMK. Kebijakan tersebut juga diterapkan di daerah lain di Jateng. Hal itu sesuai SE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan ditindaklanjuti Pemkab Sukoharjo.

SE ini dipakai sebagai dasar kuat penundaan KBM tatap muka di sekolah. Kegiatan pembelajaran semester baru yang dimulai Senin (4/1) tahun 2021 tetap memakai sistem online seperti sebelumnya.

Kebijakan diambil karena kondisi sekarang masih pandemi Covid-19. Apabila dipaksakan dikhawatirkan bisa terjadi penularan dan muncul kluster baru kasus positif virus di sekolah. Keselamatan dan kesehatan siswa dan guru menjadi alasan kuat bagi pemerintah menunda KBM tatap muka.

"Kegiatan KBM tatap muka atau pembelajaran antara siswa dan guru di sekolah ditunda. Awal semester baru yang dimulai Senin tetap secara online atau daring," ujarnya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo meminta sekolah untuk mentaati kebijakan tersebut karena sudah diputuskan Pemprov Jateng. Selain penundaan KBM tatap muka, dalam SE juga menegaskan larangan kerumunan massa di sekolah demi mencegah penularan virus Korona.

Para kepala sekolah pada saat pelaksanaan KBM tetap diminta laporan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo terkait kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, guru juga wajib memantau dan mengevaluasi pembelajaran siswa di rumah secara online.

Darno menegaskan, artinya apa yang dilaksanakan sekolah termasuk guru didalamnya bisa terpantau dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebab sistem online meski terbantu keberadaan internet namun tetap sulit karena terkendala gangguan sinyal diberbagai wilayah dan banyaknya siswa yang harus diawasi.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan, penundaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada Januari 2021 ini dinilai lebih baik daripada memaksakan diri dan menambah kasus penularan virus Korona. Hal itu dilakukan demi menjaga kesehatan masyarakat khususnya anak sekolah yang rentan tertular. **(Mam)-f**

## DPR Tolak Penghapusan Skema Jalur CPNS Guru

**JAKARTA (KR)** - Komisi X DPR menolak penghapusan skema jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru dalam skema rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penghapusan jalur CPNS bagi guru dikhawatirkan menurunkan minat kalangan muda untuk memilih profesi pendidik.

Demikian dikemukakan Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, Sabtu (2/1). "Kami berharap hal itu masih rencana, bukan suatu keputusan, sehingga bisa dicabut," ujar Syaiful Huda.

Guru merupakan profesi yang membutuhkan stabilitas hidup tinggi bagi pelakunya. Mereka dituntut tidak hanya skill mengajar, tetapi juga mampu menjadi teladan dari sisi moral maupun spiritual. Standar tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak ada jaminan kesejahteraan maupun karier bagi para pendidik di negeri ini.

"Status PNS bagi guru harus dipandang sebagai upaya negara untuk menghadirkan jaminan ke-

sejahteraan dan karier mereka. Dengan demikian para guru bisa secara penuh mencurahkan hidupnya untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan menjadi teladan bagi peserta didik," tegas Huda.

Berangkat dari pemikiran itu, katanya, skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebenarnya tidak cocok untuk para guru. Dengan skema ini, mereka setiap tahun harus dievaluasi dan sewaktu-waktu bisa mendapatkan pemutusan hubungan kerja jika dinilai tidak mumpuni.

Menurut Huda, jika saat ini ada rencana rekrutmen sejuta guru



KR-Istimewa

### Syaiful Huda

honor dengan skema PPPK harus dibaca sebagai upaya terobosan perbaikan nasib bagi jutaan guru honorer yang lama terkatung-katung nasibnya, karena tak kunjung diangkat sebagai PNS oleh negara.

"Jadi jangan hal itu dijadikan legitimasi untuk menutup pintu jalur PNS bagi guru. Semua ada konteksnya tidak bisa semena-mena dicampur adukkan," tan-

dasnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa begitu saja beralibi skema PPPK sudah jamak dilakukan dibanyak negara maju. Bahkan, PPPK di negara-negara tersebut begitu mendominasi dibanding PNS dengan komposisi 30:70. Kendati demikian komposisi itu harus dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia. Apakah memang cocok atau membutuhkan afirmasi.

Jika komposisi tersebut memang cocok, kata Huda, pertanyaan lebih jauh apakah guru termasuk tepat diambil dari pegawai kontrak. "Guru itu output-nya bukan produk atau dokumen yang bisa diukur secara matematis. Guru itu output-nya adalah skill sekaligus karakter dari peserta didik. Jika mereka dengan mudah diambil dan dibuang karena status kontrak, bisa dibayangkan bagaimana output peserta didik kita di masa depan," katanya. **(Ati)-f**

## PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP DIMULAI

### Tetap Mengacu SKB Empat Menteri

**JAKARTA (KR)** - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan kembali, penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai Januari 2021 tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Demikian Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Naim, di Jakarta, Minggu (3/1). Aturan yang diumumkan 20 November 2020 tersebut juga memuat panduan lengkap pembelajaran tatap muka (PTM) semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 mulai

dari tahapan perizinan, prosedur yang harus dipenuhi, hingga prasyarat dan protokol kesehatan yang wajib dijalankan.

Pemberian izin pelaksanaan PTM di satuan pendidikan dilakukan pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Pemberian izin PTM juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan.

Menurut Ainun, terdapat beberapa poin utama dalam SKB empat menteri tersebut. Pertama, keputusan membuka sekolah harus

mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orangtua murid.

"PTM sifatnya diperbolehkan tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orangtua. Jika orangtua belum nyaman, siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah," tegas Ainun.

Kedua, sekolah yang dibuka juga wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat. Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut Ainun mengatakan, dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap



KR-Istimewa

### Ainun Naim

harus dijunjung. Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat sebagai prioritas utama. Kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan. **(Ati)-f**

## EKONOMI

### POJK Terbaru Akomodasi UKM

**JAKARTA (KR)** - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan berbagai kebijakan Pasar Modal sejalan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal tersebut diwujudkan dengan menerbitkan ketentuan yang mengakomodir kebutuhan permodalan UKM, dukungan implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan kemudahan penerbitan obligasi daerah.

"OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong PEN melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. OJK berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan PEN dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum PEN," ungkap Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Minggu (3/1).

Wimboh mengatakan, penerbitan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Regulasi yang baru ini merupakan kebijakan OJK dalam mengakomodasi kebutuhan UKM untuk memanfaatkan industri Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan dengan cara penerbitan Efek sehingga dapat membantu kebutuhan pengembangan UKM.

"OJK memberikan kemudahan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan industri Pasar Modal dengan memperluas Efek yang ditawarkan bersifat ekuitas (saham) maupun utang dan atau Sukuk. Selain itu, memperluas kriteria Penerbit (issuer) dari yang sebelumnya adalah badan hukum berbentuk PT sekarang boleh berbadan hukum koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, atau Persekutuan Komanditer," kata Wimboh. **(Ira)-f**

### Amar Bank Raih Penghargaan IT

**JAKARTA (KR)** - PT Bank Amar Indonesia Tbk. (Amar Bank) sebagai perusahaan teknologi dengan lisensi perbankan dan bank digital murni pertama yang fokus pada pengembangan digital-only bank di Indonesia meraih 2 penghargaan TOP Digital Awards 2020 yang diselenggarakan majalah IT Works. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Amar Bank dalam mengelola bisnisnya secara modern, profesional, dan lebih terpercaya dengan mengimplementasikan serta memanfaatkan teknologi informasi dan digital yang lebih canggih.

Penghargaan untuk dua kategori dalam ajang Top Digital Awards 2020, yaitu TOP DIGITAL Implementation 2020 on Bank Sector #Level Stars 4 dengan predikat sangat baik dan TOP Leader on Digital Implementation 2020 untuk Vishal Tulsian selaku Presiden Direktur PT Bank Amar Indonesia Tbk.

"Pencapaian Amar Bank ini merupakan bukti kerja keras seluruh tim Amar Bank sejak tahun 2014 yang terus bertransformasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan inovasi teknologi agar dapat berdampak dan mengubah hidup nasabah menjadi lebih baik," kata Presiden Direktur Amar Bank Vishal Tulsian di Jakarta, kemarin. **(Lmg)-f**

## WNA DILARANG MASUK INDONESIA

### Industri Pariwisata DIY Tidak Terdampak

**YOGYA (KR)** - Pemerintah mengeluarkan larangan masuknya Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke Indonesia pada 1 sampai 14 Januari 2021. Hal ini terkait temuan varian baru virus Korona yang lebih cepat menular yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 4 tahun 2020.

Sementara itu, pemerintah memberikan aturan khusus bagi WNA yang masuk ke Indonesia hingga 31 Desember 2020 yang diwajibkan untuk memiliki hasil tes RT-PCR di negara asal berlaku 2x24 jam sebelum jam keberangkatan.

Menanggapi regulasi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Singgih Raharjo menilai, *travel ban* ke Indonesia bagi WNA yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemenu) tersebut tidak terlalu berdampak terhadap

industri pariwisata DIY. Sebab kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) bisa dibalang sangat kecil dan masih ditutupnya *border* antarnegara sehingga tidak ada penerbangan internasional langsung selama pandemi Covid-19.

"Wisman sendiri belum percaya diri berkunjung ke negara lain dan dari negaranya sendiri belum diperbolehkan melakukan kunjungan ke Indonesia. Jadi larangan WNA ke Indonesia yang dikeluarkan Kemenu mulai 1 hingga 14

Januari 2021 mendatang tidak berpengaruh terhadap pariwisata di DIY," tandasnya kepada KR di Yogyakarta, Minggu (3/1).

Senada, Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) DIY Hery Setyawan menuturkan, pelaku biro perjalanan wisata DIY tidak banyak terpengaruh larangan WNA masuk ke Indonesia pada 1 hingga 14 Januari 2021 tersebut. Sebab Indonesia belum membuka *border* antarnegara, begitu pula *border* negara lain masih ditutup sehingga wisman belum bisa masuk hingga saat ini. Dengan kata lain wisman di DIY sejak pandemi Covid-19 bisa dibalang sudah tidak ada. Sehingga larangan dari Kemenu tersebut tidak menjadi masalah bagi Asita DIY.

"Saya melihat tidak ada be-

danya dengan adanya larangan WNA masuk ke Indonesia pada awal tahun 2021, sebab *border* seluruh negara belum dibuka sejak pandemi. Jadi larangan Kemenu tersebut sama sekali tidak berpengaruh dan tidak ada bedanya bagi pelaku biro perjalanan wisata di DIY," katanya.

Hery mendukung dan siap mengikuti setiap kebijakan pencegahan Covid-19 tersebut apabila demi kebaikan bersama, khususnya mencegah penyebaran virus Korona varian baru. Negara-negara lain yang terdampak pandemi Covid-19 pun banyak yang menutup akses keluar masuk antarnegara. Sehingga Asita DIY menilai kebijakan pemerintah tersebut tepat karena Indonesia adalah bagian dari bangsa-bangsa yang sedang menghadapi Covid-19. **(Ira)-f**

## PROMOSI KE BERBAGAI PAMERAN INTERNASIONAL Pemda DIY Tingkatkan Ekspor Nonmigas

**YOGYA (KR)** - Pemda DIY menggulirkan beberapa strategi sebagai upaya mendorong dan meningkatkan ekspor khususnya ekspor nonmigas di DIY. Sementara itu, isu strategis di bidang perdagangan luar negeri adalah peningkatan ekspor nonmigas dan ekspor jasa saat ini.

"Strategi pertama adalah melakukan promosi berskala ekspor melalui berbagai event pameran internasional baik secara luring maupun daring. Selanjutnya melakukan temu bisnis yang difasilitasi kami maupun kerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Luar Negeri (Kemenu) maupun asosiasi," tutur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY Aris Riyanta di Yogyakarta, Minggu (3/1).

Aris mengaku melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM/UKM dalam peningkatan kualitas mutu desain, kemasan serta fasilitasi peningkatan standarisasi produk. Kemudian mengadakan pelatihan ekspor bagi IKM sudah siap ekspor guna menyiapkan dokumen ekspor bekerjasama dengan stakeholder terkait.

"Kami juga mengencarkan sosialisasi peraturan-peraturan perdagangan luar negeri dan peningkatan akses pasar luar

negeri, rapat koordinasi dan Focus Discussion Group (FGD) dalam mengatasi permasalahan atau kendala kegiatan ekspor impor," imbuhnya.

Strategi lainnya, lanjut Aris, melakukan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan fasilitasi penyelesaian permasalahan kegiatan ekspor dan impor di DIY. Fokus prioritas di bidang perdagangan luar negeri yakni mengamankan pangsa ekspor pasar tradisional atau market maintenance, memperluas pangsa pasar ekspor pasar nontradisional atau *market creation* lalu mengidentifikasi peluang ekspor produk dan jasa potensial atau *product creation*. "Terakhir mengamankan pasar domestik guna meningkatkan daya saing produk nasional alias import management," ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY ini menegaskan, arah kebijakan pembangunan luar negeri secara nasional yaitu peningkatan daya saing dan pengamanan pasar dalam negeri. Peningkatan daya saing ini bisa dilakukan antara lain diversifikasi produk melalui hilirisasi, perizinan online, pengamanan akses pasar dan harmonisasi kebijakan. Sedangkan pengamanan pasar dalam negeri dengan pengelolaan impor. **(Ira)-f**

## 2021, Momentum Kebangkitan Parekraf

**JAKARTA (KR)** - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berdialog dengan Mantan Menparekraf yang kini menjabat sebagai World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships. Pertemuan secara virtual dengan Mari Elka Pangestu ini membahas dan menjajaki kolaborasi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sekaligus peran serta World Bank di dalamnya.

"Alhamdulillah saya terhubung dengan Manajer Direktur World Bank, Ibu Mari Pangestu yang kebetulan juga menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada kabinet sebelumnya. Kita diskusi mengenai fokus ke depan *quality* dan *sustainable tourism*," kata Sandiaga Salahuddin Uno di Jakarta, Sabtu (2/1).

Sandi meyakini, tahun 2021 sebagai ekonomi kreatif akan menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) Indonesia. Pembahasan yang digarisbawahinya dalam pertemuan itu adalah perubahan fokus pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa depan, yakni dari semula kuantitas dan pariwisata massal ke arah peningkatan kualitas dengan pariwisata yang berkelanjutan.

"Perubahan fokus tersebut juga merujuk pernyataan Gubernur Bali I Wayan Koster yang mengungkapkan *key performance indicator* (KPI) tidak hanya melulu bertumpu pada kuantitas, tetapi juga pendapatan dalam negeri dari sektor pariwisata. Selain itu, dampak dari terbangunnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif, seperti penciptaan lapangan kerja yang bernutrisinya dapat dikembangkan lewat pendekatan berbasis data," jelas Sandi. **(Lmg)-f**